

BAB 2

KERANGKA TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

Penjelasan tentang kerangka teori, setidaknya memiliki makna penting, yaitu 1) untuk mensistematikkan temuan-temuan penelitian, 2) untuk membantu dalam menyusun hipotesis guna membimbing peneliti mencari berbagai jawaban dan membuat prediksi atas dasar temuan, 3) untuk menyajikan penjelasan dalam menjawab pertanyaan. Sedangkan penjelasan mengenai kajian pustaka, Creswell menyebutkan beberapa tujuan, di antaranya; 1) memberikan informasi kepada pembaca hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan saat itu, 2) menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada, dan mengisi celah-celah dalam penelitian-penelitian sebelumnya, 3) menyediakan kerangka kerja dan tolok ukur untuk mempertegas pentingnya penelitian tersebut, seraya membandingkan hasil-hasilnya dengan penemuan-penemuan lain (Creswell: 2016: 36).

2.1. Kerangka Teori

Kajian ini terkait praksis sosial dan oleh karena itu dalam mendekatinya menggunakan perspektif konstruktivisme, yaitu sebuah perspektif yang melihat manusia sebagai sosok aktif dalam berpikir dan bertindak, sosok yang selalu berinteraksi dan bertindak mencipta suatu makna dari realitas yang telah dipelajarinya. Konstruktivisme merupakan momentum dari postmodernisme (Saifuddin, 2005: 41). Oleh karena itu, penelitian ini diinspirasi oleh salah satu teori postmodernisme yang dibangun oleh Pierre Bourdieu tentang praksis sosial.

Secara sederhana, praksis sosial bisa diformulasikan sebagai berikut: $(\textit{habitus} \times \textit{modal}) + \textit{medan/ranah} = \textit{praktik}$ (Harker, et-al: 2009: 4-26). Bourdieu (1995; 1990) menjelaskan praksis sosial sebagai hasil dari dialektika antara internalisasi eksterior dan eksternalisasi interior. Internalisasi eksterior terjadi ketika pelaku menerima pengaruh struktur, sebaliknya eksternalisasi interior terjadi ketika struktur menerima pengaruh pelaku. Dengan kata lain, praktik merupakan hasil dialektika antara struktur dan agen. Dalam hal ini, Bourdieu (1995: 3-5; 72-73) mengajukan konsep “habitus” yang berfungsi sebagai mediator antara struktur obyektif dengan tindakan agen tersebut.

Habitus. Bourdieu (1984: 468) memaknai habitus sebagai hasil internalisasi dunia sosial, atau struktur sosial yang dibatinkan dan diwujudkan. Ia merupakan sistem yang berlangsung lama dan dapat diwariskan, dan berfungsi sebagai landasan praksis yang menyatu dan terstruktur:

“The cognitive structures which social agents implement in their practical knowledge of the social world are internalized, 'embodied' social structures”.

Bagi Bourdieu (1992: 16; 126-127), habituslah yang menyetir atau mempengaruhi pelaku untuk memahami, mempersepsi dan mengapresiasi tindakan berdasarkan pada skema yang dipancarkan arena sosial, sehingga agen dalam merespon realitas menjadi efisien. *Habitus* juga menyejarah dan bukan ide bawaan. Karena *habitus* menyejarah, maka ia bersifat dinamis. Jika posisi dalam arena (*field*) berubah, maka disposisi yang membentuk *habitus* juga berubah (Haryatmoko: 2016: 41-42). Bourdieu (1998: 8) menyatakan:

“But habitus are also classificatory schemes, principles of classification, principles of vision and division, different tastes. They make distinctions between what is good and what is bad, between what is right and what is wrong, between what is distinguished and what is vulgar...”

Habitus juga merupakan skema klasifikatif, yang melahirkan perbedaan gaya hidup. Skema ini didapatkan dari proses interaksi antara individu dengan individu lainnya atau dengan lingkungannya; berupa klasifikasi baik dan buruk, pantas dan tidak pantas, benar dan salah, rasional dan irasional, dan lainnya yang kemudian diinternalisasi.

Modal. Untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah pertarungan di arena, pelaku harus memiliki apa yang disebut sebagai modal. Untuk menciptakan kesempatan-kesempatan dalam hidup individu memerlukan modal. Bourdieu (1996: 114) menjelaskan modal sebagai

“...as the set of actually usable resources and powers”,

yakni sekumpulan sumber daya dan kekuasaan yang benar-benar bisa digunakan. Bourdieu menggunakannya sebagai istilah untuk memetakan hubungan-hubungan kekuasaan dalam masyarakat. Bourdieu (1996: 114; 1992: 119) menyebutkan empat jenis modal, yakni 1) modal sosial, 2) modal ekonomi, dan 3) modal budaya. Kemudian Bourdieu (1992: 119) pada kesempatan lain menambahkannya satu modal lagi, yaitu 4) modal simbolik.

Haryatmoko (2016: 45) menjelaskan bahwa modal ekonomi terkait dengan kelebihan ekonomi dari salah satu pihak seperti kekayaan, gaji atau penghasilan. Modal budaya meliputi selera yang bernilai budaya dan pola-pola konsumsi budaya; juga berupa pendidikan seperti pengetahuan yang sudah diperoleh dan dimiliki serta kemampuan baca tulis, seni, bentuk-bentuk bahasa, aturan-aturan budaya atau nilai-nilai dan norma-norma, cara berbicara, cara pembawaan, sopan santun, cara bergaul dan lainnya yang berperan dalam penentuan dan reproduksi posisi-posisi social. Modal sosial terkait dengan (jaringan) hubungan-hubungan yang berguna dalam penentuan dan reproduksi posisi-posisi social. Modal simbolik mencakup banyak hal; seperti berbagai atribut yang memiliki makna simbolik. Misalnya, kelas, prestise, status, otoritas; kendaraan; petunjuk-petunjuk yang menunjukkan status tinggi pemilikinya, misalnya gelar, pakaian, cara bagaimana tamu menunggu.

Modal terkait dengan *habitus*, arena dan praktik. Jadi, dalam dunia praksis sosial, intinya adaah tiga hal tersebut. Habitus, modal dan arena. Siapa yang habitusnya paling pas, modalnya paling banyak dan lengkap, dan ditujukan pada arena yang sesuai, maka dialah yang menang/ unggul/ dominan di dunia sosial. Posisi unggul/ dominan akan diperoleh atau dipertahankan dengan berbagai strategi. Bourdieu (1996: 125-131; Fashri, 2014: 113-114) memetakan strategi ke dalam dua hal. *Pertama*, strategi reproduksi yakni kumpulan praktik yang dirancang untuk mempertahankan atau meningkatkan aset-aset para pelaku dengan kecenderungan ke arah masa depan. Strategi ini bergantung pada jumlah dan komposisi modal, serta kondisi sarana reproduksi. *Kedua*, strategi penukaran kembali berkaitan dengan pergerakan-pergerakan di dalam ruang sosial yang terstruktur dalam dua dimensi, yaitu keseluruhan jumlah modal yang terstruktur dan pembentukan jenis modal yang dominan dan yang terdominasi.

Strategi biasanya digunakan pelaku melalui pertahanan dan perbaikan posisi, dan pembedaan diri guna memperoleh posisi baru. Mereka yang berada dalam posisi dominan cenderung memilih strategi bertahan. Sementara yang didominasi menggunakan strategi resistensi atau perlawanan untuk meruntuhkan dominasi pihak dominan agar bisa medapatkan posisi baru. Strategi lainnya bisa dengan cara mendiskreditkan jenis modal yang menjadi kekuatan pihak lain, termasuk juga dominasi melalui wacana. Dominasi wacana, yang

merupakan bentuk kekerasan simbolik, dan biasanya pihak lain melakukan pembalikan wacana.

Arena. Arena adalah ruang-ruang yang ada di tengah-tengah masyarakat, di mana individu atau kelompok berinteraksi, dan saling berlomba untuk mencapai titik tujuan tertentu. Bourdieu (1992: 101) menyebutkan arena sebagai medan adu kekuatan yang mana di dalamnya terdapat upaya saling memperebutkan dan saling mempertahankan sumber daya atau modal demi memperoleh akses untuk mendekati kekuasaan. Arena juga berarti suatu medan perjuangan/ medan perebutan yang dinamis yang ditujukan untuk mempertahankan atau mengubah konfigurasi kekuatan-kekuatan yang ada. Setiap pelaku saling bergumul dan berjuang supaya unggul dan mampu bertahan, yang mana proses ini sangat ditentukan oleh kepemilikan modal individu atau kelompok dan strategi pendayagunaannya.

Posisi Agen dan Struktur. Proses praktik sosial menyiratkan adanya proses tarik menarik antara agen dan struktur. Apakah agen mempengaruhi struktur atau struktur yang mempengaruhi agen. Bourdieu (1990: 31) dalam hal ini berusaha menjembatani oposisi *absurd* antara individu dan masyarakat; dualisme sudut pandang antara obyektifisme dan subyektifisme. Keduanya bertemu pada apa yang disebut sebagai praktik sosial sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Jadi, individu dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh struktur, dan begitu juga sebaliknya, atau istilah internalisasi ekterior dan eksternalisasi interior. Artinya, individu atau kelompok sebenarnya mereka bebas melakukan sesuatu, akan tetapi tidak bisa bebas sepenuhnya karena mereka juga dibatasi oleh *habitus-habitus* lain yang menjadi struktur (Ismail: 2010: 15). Ahearn (2001: 119) menjelaskan adanya relasi timbal balik antara tindakan agen dengan struktur, dalam konsep agensi Bourdieu. Hal ini karena Bourdieu, menekankan disposisi-disposisi pelaku, dan karena *habitus* berada dalam lingkaran fisik dengan segala tindakan para pelaku, baik yang berwujud secara mental maupun fisik, sehingga *habitus* bisa diterapkan dalam situasi baru untuk memperkuat kondisi yang sudah ada.

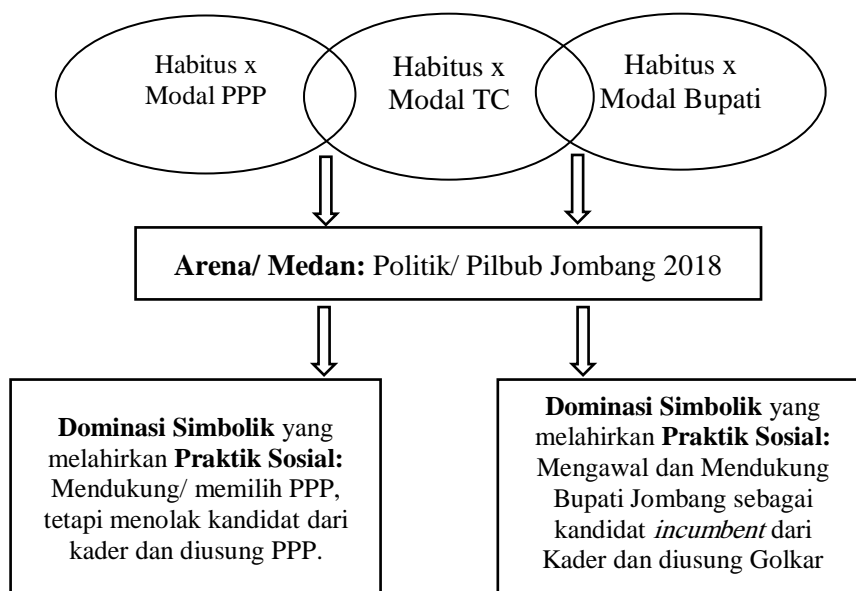
Dominasi Simbolik. Jadi, dalam dunia praksis sosial, sebenarnya intinya ada tiga hal di atas, yaitu: *habitus*, modal dan arena. Siapa yang *habitusnya* paling pas, modalnya paling banyak, dan arenanya paling sesuai, maka dialah yang menang di dunia sosial. *Habitus* yang

terbentuk, kapital yang terkumpul, dan arena yang terpilih pada gilirannya ditentukan oleh dominasi simbolik. Dominasi ini dipahami sebagai penindasan dengan menggunakan simbol-simbol. Penindasan model ini tidak dirasakan sebagai penindasan, tetapi sebagai sesuatu yang secara normal perlu dilakukan. Artinya, penindasan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari pihak yang ditindas itu sendiri. Sebuah relasi antar pelaku yang tidak setara, dimungkinkan terjadinya dominasi; siapa berposisi sebagai apa, apakah berada dalam posisi mempengaruhi atau dipengaruhi. Dominasi simbolik tak lain adalah kekuasaan simbolik yang bisa membuat orang mengenali dan mempercayai, memperkuat dan mengubah pandangan mengenai dunia. Kekuasaan simbolik adalah sebuah kekuasaan yang mengkonstruksi realitas dan mengendalikan makna simbol (Bourdieu, 1991: 166). Jadi, pendefinisian atas sesuatu dikendalikan oleh otoritas tertentu dalam sebuah kumpulan masyarakat. Pemegang kekuasaanlah yang menentukan makna, sesuai dengan selera ideologinya. Kekuasaan simbolik membuat individu atau kelompok menjadi tunduk dan patuh secara tidak sadar akan adanya pemaksaan, menerima tanpa tanya, dan ditanamkan melalui simbol-simbol. Dengan demikian, pihak yang terdominasi akan menerima makna yang diproduksi atau direproduksi pihak yang mendominasi.

Dominasi simbolik dijalankan melalui kekerasan simbolik, yang beroperasinya dengan dua cara. *Pertama*, melalui cara eufemisasi (*euphemization*,) yaitu menjadikan kekerasan simbolik tidak kelihatan, berlangsung secara lembut, serta mendorong orang untuk menerima apa adanya. Biasanya cara ini berlangsung dengan melembutkan ekspresi, wacana atau bahasa ke dalam bentuk-bentuk filosofis yang bersifat abstrak. *Kedua* melalui mekanisme sensorisasi (*censorship*). Mekanisme ini beroperasi tidak hanya di dalam produksi wacana oral sehari-hari, tetapi juga berhubungan dengan produksi wacana ilmiah yang dibangun dalam teks tertulis (Bourdieu, 1980:186). Tujuannya ialah untuk menentukan hal yang boleh dikatakan dan hal yang tidak boleh dikatakan dalam rangka pelestarian “nilai-nilai utama”, sebagaimana dikatakan oleh Bourdieu (1980:187), “*The need for this /censorship to manifest itself in the form of explicit prohibitions, imposed and sanctioned by an institutionalized authority*”. Mekanisme kekerasan simbolik bekerja secara efektif ketika yang didominasi merasakan ketidaktahuan sekaligus mengakuinya. Karena itu, menurut Bourdieu, kekerasan

simbolik beroperasi lewat prinsip simbolik yang diketahui dan dikenali oleh kedua belah pihak, yaitu yang mendominasi dan yang didominasi, entah itu bahasa, gaya hidup, cara berpikir, cara berbicara, bahkan cara bertindak sekalipun (Bourdieu, 1986:2).

Gambar Bagan. 1
Mekanisme Teori Praktik Sosial Pierre Bourdieu
dalam Praktik Dualisme Pilihan Politik Tarekat Cukir
pada Pilbup Jombang 2018



2.2. Kajian Pustaka

Terlalu banyak penelitian-penelitian tentang kelompok tarekat, dilihat dari berbagai perspektif. Namun tidak mengaitkannya dengan praktik politik yang dijalankannya. Misalnya, dilihat dari perspektif ritualnya, seperti penelitian Basri (2014), Ecep Ismail (2017), dan Ummah (2018), perspektif falak seperti karya Tarihoran (2015), perspektif profil tokoh dan karyanya misalnya Masrur (2014), Ilyas (2017), Arifin (2018), perspektif fungsi amalan tarekat sebagai terapi, seperti penelitian Miftahuddin (2018), perspektif ilmu hadis, seperti Ahmadi (2017) perspektif mazhab fikih (Zuhdi, 2014), tarekat dan lingkungan, seperti Masduki dan Hartono (2013), dan masih banyak lagi.

Kajian-kajian di atas, masih mengabaikan kajian tarekat perspektif praktik politik yang dilakukan oleh kelompok tarekat. Untuk melengkapi

hal itu, maka kajian ini berfokus pada praktik politik, khususnya praktik dualisme pilihan politik yang dilakukan oleh kelompok Tarekat *Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah* Cukir Jombang Jawa Timur di arena Pilbup Jombang 2018. Dalam kajian pustaka ini, paling tidak, peneliti akan membaginya ke dalam beberapa bagian. *Pertama*, tulisan-tulisan tentang praktik kelompok tarekat. *Kedua*, relasi antar individu di internal kelompok tarekat. *Ketiga*, Tarekat dan Politik.

2.2.1. Tarekat dan Praktik

Munir (2015) berfokus pada praktik bisnis dan wirausaha yang dilakukan oleh kelompok Tarekat *Shiddiqiyah*. Tulisan ini menemukan bahwa dalam menjalankan bisnis dan wirausahanya, Tarekat tersebut tidak hanya mendayagunakan modal ekonominya, tetapi juga modal spiritualnya. Meskipun tulisan ini berfokus pada perspetif ekonomi, bukan politik yang tentunya berbeda dengan disertasi ini, namun temuannya penting untuk dicatat untuk membantu menemukan modal yang dimiliki oleh Tarekat Cukir dan didayagunakannya ketika berelasi dengan pihak lain, khususnya terkait dengan partai politik dan bupati. Artikel Munir ini tampaknya merupakan penggalan dari bentuk edisi lengkapnya dengan judul *Semangat Kapitalisme dalam Dunia Tarekat* (2015). A'dam (2011) membahas tentang etos ekonomi Tarekat *Shiddiqiyah*. A'dam menemukan bahwa praktik/ aktifitas ekonomi bukan hanya dipandang sebagai urusan duniawi belaka, tetapi merupakan bagian tak terpisahkan dari aktifitas ukhrawi; aktivitas ekonomi dijadikannya sebagai lahan ibadah yang dalam praktiknya tidak hanya untuk kepentingan pribadi saja, tetapi juga untuk kepentingan sosial. Dua penelitian di atas dilengkapi oleh Dodi (2018) yang menemukan bahwa Tarekat *Shiddiqiyah* ingin mencapai pengalaman mistisisme bahwa pengejawentahan diri pada sebuah kecintaan kepada Allah Yang Tiada Tanding. Zikir-zikir yang menjadi ajarannya tidak hanya bermakna duniawi tetapi juga bermakna ukhrawi. Dari diperoleh informasi penting tentang ajaran, tujuan, dan modal dalam bertindak dalam kehidupan.

Ketiga tulisan tersebut menjadi penting untuk menambah informasi untuk memotret tindakan politik Bupati Jombang ketika berelasi dengan kelompok Tarekat Cukir, karena ia merupakan salah satu dari keluarga besar tarekat tersebut. Saifullah (2012) dalam artikelnya menyebutkan bahwa orang yang mendalami spiritual dengan memasuki

kehidupan tasawuf tidaklah menjadikan orang rendah etos kerjanya akan tetapi justru sebaliknya mereka etos kerjanya tinggi. Artinya, modal spiritual terkait erat dengan etos kerja kalangan jama'ah tarekat. Ketiga artikel di atas lebih berfokus pada masalah praktik ekonomi, dan masih mengabaikan praktik politik yang dilakukan oleh kelompok tarekat. Akan tetapi patut dicatat dari ketiga artikel di atas bahwa dalam meningkatkan kehidupan ekonomi mereka sehari-hari, kaum tarekat mendayagunakan modal yang mereka miliki, yaitu modal spiritual. Informasi ini menjadi penting bagi peneliti ketika menjelaskan modal yang digunakan oleh Tarekat Cukir ketika berelasi dengan pihak lain dalam praksis sosialnya.

Hafil (2016) dalam penelitiannya menjelaskan tentang adanya internalisasi amalan TQN ke dalam tradisi masyarakat Madura. Penelitian tersebut menunjukkan adanya proses saling mempengaruhi antara ajaran tarekat dan tradisi masyarakat setempat, sehingga melahirkan praktik ritual "Kompolan Sabellesen". Parveen (2014) menemukan bahwa praktik sufisme di India telah mengadaptasi diri terhadap tradisi masyarakat setempat, dan bahkan dalam beberapa hal meminjam praktik ibadah masyarakat setempat. Adaptasi ini merupakan strategi bagi kaum sufi untuk mempertahankan eksistensinya. Kedua artikel ini membahas masalah praktik ritual dan masih mengabaikan praktik politik yang dijalankan kelompok tarekat. Selain itu juga menjelaskan bahwa strategi adaptasi sebagai strategi bertahan.

2.2.2. Relasi Antar Individu di Internal Tarekat

Relasi Murid-Mursyid. Penelitian Mudin (2015) membahas tentang *suhbah* antara mursyid dengan murid. Ia menemukan bahwa mursyid memberikan pengaruh yang kuat terhadap murid dalam pendidikan ruhani. Artikel ini masih mengabaikan pembahasan tentang bagaimana pengaruh mursyid terhadap pilihan politik para murid. Penelitian Musthofa (2017) sepertinya melengkapi artikel di atas. Ia menemukan bahwa dalam relasi antara mursyid dan murid, pihak mursyid memberikan pengaruh kepada murid tidak hanya pada ranah spiritual ruhani saja, tetapi juga pada ranah sosial secara lebih luas. Artikel ini belum menjelaskan secara spesifik tentang pengaruh mursyid terhadap pilihan politik, baik partai politik maupun politik elektoral. Apalagi unit penelitiannya adalah Tarekat Syadziliah Tulungagung yang dikenal tidak memiliki akar sejarah keberpolitikan, baik dengan partai maupun pemerintah. Akan tetapi kedua temuan tersebut sangat berguna

bagi peneliti untuk menambah informasi yang turut memperkuat argumen, tentang pengaruh mursyid terhadap pilihan politik di Tarekat Cukir.

Kajian Salahudin (2013) menunjukkan adanya pola komunikasi yang terbangun di internal TQN di Suryalaya sebagai pola sentralistik terintegrasi, yaitu pola komunikasi yang terpusat pada satu figur mursyid, dan terintegrasi pada ajarannya yang dianggap sebagai sebuah “ideologi”. Kajian ini berfokus pada fenomenologi esoteris internal TQN Suryalaya, sehingga masih belum menjawab tentang relasinya dengan pihak lain di luar dirinya. Namun demikian, dari penelitian ini bisa diketahui pola relasi yang terjadi di internal TQN Suryalaya yang cenderung sama dengan TQN yang lain.

Relasi Pria-Wanita. Mulyadi (2015) dalam artikelnya menyebutkan bahwa wanita bisa tampil sebagai mursyidah, dengan catatan pembaiatan dibatasi dan berlaku hanya untuk kaum perempuan. Mulyadi mencatat, setidaknya ada empat mursyidah yang membaiat di *Naqsyabandiyah Muzhariyah* wilayah Madura, yaitu Nyai ‘Aisyah, Nyai Thobibah, Nyai Syafi’ah, dan Nyai Syarifah Fathimah. Hanya saja, di Tarekat Cukir belum pernah ditemukan seorang mursyidah.

Frede (2014) dalam artikelnya, ia menyebutkan tentang adanya pemimpin spiritual dari kalangan wanita. Di Mauritania terdapat tokoh wanita yang telah lama terlibat dan menjalani hidupnya sebagai mursyidah bagi Tarekat *Tijaniyah* dan sebagai pengajar bagi wanita lainnya. Mereka umumnya berasal dari keluarga kecil yang memang terpelajar dan memiliki pengaruh yang luas. Hanya saja, setelah kegiatannya, mereka tetap kembali ke bilik-bilik rumah mereka dan terisolir dari kehidupan sosial yang lebih luas. Situasi dan kondisi belakangan yang semakin terbuka, termasuk akses ruang belajar, telah menunjukkan peran wanita, baik dalam pemandu spiritual/ mursyidah maupun pengajar keislaman. Mereka terlibat dalam pengajaran dan produksi pengetahuan Islam. Namun pada akhirnya, tetap saja partisipasi wanita dalam pengetahuan Islam dan otoritas merupakan tugas yang sulit.

El-Haitami (2014) menemukan bahwa wanita di Maroko di era kontemporer ini bisa memperoleh akses perannya di ruang keagamaan dan partisipasi sosial. Selanjutnya, praktik dalam kerangka kesufian menjadi elemen penting bagi wanita untuk mengakses pengetahuan

keagamaan dan mempunyai kontribusi terhadap pembangunan tradisi pendidikan, yang keduanya melihat wanita sebagai penyedia dan penerima instruksi. Aktifitas wanita dalam tradisi sufi telah tumbuh menjadi sebuah sisi penting bagi keagenan perempuan, sebuah konsep biasanya diasosiasikan dengan format yang lebih eksplisit dari resistensi terhadap struktur patriarki.

Dari ketiga artikel di atas, fokus pembahasan cenderung membahas tentang peran wanita di dalam dunia ketarekatan. Sementara penelitian penulis fokus pada praktik pilihan politik kelompok tarekat dalam kasus pemilihan kepala daerah. Akan tetapi ada hal penting yang bisa diambil dari ketiga artikel di atas, yakni bahwa seterusnya kaum tarekat, masih cenderung memandang terhadap kaum wanita sebagai *subordinat* bagi kaum laki-laki. Pandangan ini bisa menjadi pembanding dalam disertasi ini dalam kaitannya dengan penolakan kelompok Tarekat Cukir terhadap kandidat bupati wanita pada Pilbub Jombang 2018.

2.2.3. Tarekat dan Politik

Transformasi Tarekat ke Gerakan Politik. Abdul Syukur (2014) menemukan bahwa doktrin *mahdiisme* dan *imâmah* dalam Tarekat Syafawi memberikan pengaruh yang kuat terhadap terbentuknya gerakan politik keagamaan di Iran pada abad ke 13. Tidak jauh beda dengan Temuan Isnaeni (2012) yang tampaknya lebih lengkap, bahwa setidaknya ada 4 doktrin ajaran yang direproduksi Syekh Abdul Karim Banten, seorang petinggi Tarekat *Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah*, yang melahirkan terjadinya pemberontakan Banten 1888, yaitu kedatangan Imam Mahdi (*Mahdiisme*), reproduksi peringatan terakhir Nabi Muhammad SAW saat khotbah Haji Wada', mendirikan negara Islam, dan perang sabil atau *fi sabilillâh*. Meskipun kedua tulisan ini berbeda dari penelitian penulis, baik dari sisi metode maupun pendekatan, akan tetapi doktrin-doktrin tersebut bisa dijadikan sebagai pembanding doktrin-doktrin yang mempengaruhi praktik berpolitiknya Tarekat Cukir dalam penelitian ini. Sementara artikel Noupal (2016) hanya sedikit pengulangan dari kajian Isnaeni di atas, yaitu gerakan Pan Islamisme yang ditampilkan kaum Tarekat di Banten 1888 menjadi kekhawatiran tersendiri bagi kaum penjajah kolonial.

Ketiga tulisan di atas, tidak membicarakan masalah praktik pilihan politik yang dilakukan oleh kaum tarekat dalam kaitannya dengan pemilihan kepala daerah, dan ini merupakan perbedaan dengan kajian

peneliti. Hanya saja yang perlu dicatat adalah terdapat faktor penggerak yang mempengaruhi kelompok tarekat melakukan praktik politik dalam bentuk perlawanan terhadap penguasa zalim/ penjahat. Faktor penggerak tersebut bisa jadi berbeda antara di satu tempat dengan tempat yang lain. Misalnya dalam ketiga tulisan di atas, karena adanya reproduksi doktrin ketarekatan tentang kedatangan Imam Mahdi/ *Mahdiisme* sebagai penyemangat gerakan mereka. Begitu juga di Tarekat Cukir, tentu ada suatu hal yang mempengaruhi mereka yang tidak harus sama dengan yang terjadi pada masa lalu itu. Bisa jadi, Tarekat Cukir melakukan praktik dualisme pilihan politik pada Pilbup Jombang 2018 karena adanya motivasi doktrin penggerak lainnya.

Relasi Tarekat dengan Partai Politik. Nasir, dkk (2006) dalam penelitiannya menemukan faktor dominan yang menjadi penyebab beberapa kelompok TQN di Lombok mendukung partai politik tertentu, yaitu agar bisa berperan aktif dalam kehidupan yang lebih luas. Keterlibatan dalam mendukung partai politik dan permainan strategi mereka dalam memperoleh akses kekuasaan dipandang sebagai bagian dari upaya memperjuangkan masyarakat Islam. Nasir juga menemukan adanya pola; 1) *akomodatif-mutualistik*, yang lahir dari pandangan bahwa berpolitik itu adalah dengan berkolaborasi dengan Golkar sejak dulu hingga sekarang; 2) *kolaboratif-strategis* yang lahir dari pandangan bahwa berhubungan dengan partai politik bersifat temporal, sesuai kepentingan yang ada; 3) *independen-kritis* yang lahir dari pandangan bahwa meskipun dekat dengan partai atau tokoh, tetapi tidak hanyut dalam kepentingan politik.

Artikel Nasir yang menyebutkan tentang pola relasi tersebut bisa menjadi pembanding terhadap penelitian Abdurrahman (2008) yang menemukan bahwa bahwa pola relasi yang terjadi antara kelompok TQN Suryalaya dengan pemerintahan Orde Baru bermuara dari interaksi internal antara mursyid dengan murid, yang kemudian dikembangkan ke dalam gerakan sosial keagamaan dan sosial politik. Interaksi tersebut kemudian berpengaruh kuat terhadap hubungan timbal balik dengan pemerintah, partai politik dan organisasi massa dalam rangka mencari identitas bangsa. Pola ini disebut sebagai pola relasi *akomodatif* terhadap organisasi masyarakat dan *partisipasif* terhadap politik pemerintah. Di sisi lain, Sujuthi (2001) menyebutkan tentang respon TQN di Jombang terhadap pemerintah Orde Baru. TQN Rejoso merespon pemerintah

Orde Baru cenderung *kompromis* dan sebaliknya sikap negara menunjukkan positif, TQN Cukir cenderung *antagonis* dan sebaliknya sikap pemerintah cenderung negatif, dan TQN Kedinding Lor cenderung *kooperatif*, sebaliknya sikap pemerintah cenderung positif.

Ketiga tulisan di atas, memang menunjukkan praktik politik yang dilakukan oleh kelompok tarekat ketika berelasi dengan pihak partai politik dan pemerintah, akan tetapi masih mengabaikan pembahasan tentang modal apa yang didayagunakan secara dominan oleh masing-masing pihak, sehingga melahirkan berbagai pola relasi di atas. Sementara disertai peneliti melengkapi kekosongan tersebut. Akan tetapi hal yang perlu digarisbawahi adalah pola relasi politik tersebut tidak bisa dipisahkan dari pengaruh relasi internal kelompok tarekat, utamanya antara para murid dengan mursyidnya. Informasi ini sangat penting untuk melihat kasus praktik dualisme pilihan politik yang ada di Tarekat Cukir.

Dukungan Kelompok Tarekat terhadap Partai Politik. Ma'mun Mu'min (2014) menulis artikel tentang keterlibatan mursyid TQN di Kudus dalam politik praktis mendukung Golkar di masa Orde Baru. Artikel ini menemukan bahwa menjelaskan bahwa mursyid dalam aktifitas berpolitiknya di partai Golkar berusaha mengintegrasikan antara politik dengan tarekat. Selama menjadi tokoh tarekat dan politik, hingga masa berakhirnya Orde Baru, melalui perolehan bantuan dari pemerintah, lembaga pesantren yang dikelolanya berkembang menjadi besar. Artikel ini belum memberikan penjelasan mengenai TQN yang ada di Cukir yang mendukung PPP, meskipun secara genealogi dan cikal bakalnya berasal sama-sama dari TQN Rejoso Jombang.

Kurnianto (2016) mengkaji lambang kupu-kupu pada logo TQN Suryalaya perspektif semiotik, menemukan bahwa warna kuning pada sayap kupu-kupu menunjukkan adanya kepedulian TQN Suryalaya terhadap permasalahan pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Dalam konteks ini, sayap berwarna kuning menunjuk konteks kepedulian TQN Suryalaya terhadap permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh pemerintah Orde Baru (saat itu) yang secara politis didukung oleh partai politik besar Golkar dengan simbol kebesarannya pohon beringin dengan warna kuning sebagai warna identitas partainya. Dalam konteks pendukung ini, TQN Suryalaya berupaya tetap netral dan tidak larut dalam pendukung politis, tetapi asyik untuk berkarya

nyata menyumbangkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Sikap akomodatif ditunjukkan oleh Abah Anom dengan tidak ditolaknya pejabat pemerintah yang mengunjunginya (Rohimat, 2012). Berbeda dengan temuan Bruienessen (2015) yang menjelaskan tentang adanya koneksi antara Suryalaya dengan Golkar saat itu.

Turmudi (1996) dalam tulisannya menyebutkan bahwa hubungan tarekat Rejoso Jombang dengan partai Golkar, lebih dimotivasi oleh urusan “perjuangan untuk umat”. Tulisan lainnya dalam Endang Turmudi (1998) dengan judul *The Tarekat Qadiriyyah Wa Naqsyabandiyah in East Java and Islamic Politics in Indonesia*. Tulisan ini menyebutkan bahwa konsistensi gerakan tarekat *Tarekat Qadiriyyah Wa Naqsyabandiyah* Cukir dalam mendukung PPP karena faktor lingkungan asalnya (historis). Sujuthi (2001) menulis disertasi dengan judul *Politik Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah Jombang*. bahwa ada faktor kuat yang mendasari alasan mengapa tarekat Rejoso mendukung Golkar. Yaitu; faktor *internal*: ingin memajukan pondok pesantren dan kampus Undar, karena hal ini tidak mungkin dilakukan kecuali menggandeng pemerintah yang memiliki fasilitas untuk itu semua. Selain itu, ada motif tersembunyi; yakni dari empat pondok pesantren besar di Jombang, hanya pesantren Darul Ulum Rejoso yang tidak punya tokoh atau kiai yang bertaraf nasional. Di sini tampak adanya kecemburuan sosial, ada kekurangan dan ketertinggalan Pondok Pesantren Rejoso dibanding pondok yang lain. Faktor *eksternal*: posisi politik NU yang sulit dan berat pasca pemilu 1971. Di sini kegiatan apapun, termasuk kegiatan keagamaan dikontrol dan dicurigai oleh pemerintah. Singkatnya, tarekat Rejoso mengalami tekanan politik dan hambatan dalam melaksanakan dakwah. Nur Syam (2004) menulis penelitian dengan judul “*Pembangkangan Kaum Tarekat*”. bahwa tindakan memilih PPP oleh para murid TQN Cukir ialah wajib berdasarkan kepentingan kemasyarakatan. Memilih PPP merupakan suatu keharusan untuk kepentingan agama.

Ketiga tulisan tentang TQN di Jombang, penelitian tentang Tarekat Cukir masih berkuat pada relasinya dengan partai politik, dan belum mendapatkan perhatian khusus tentang kaitannya dengan Pemilihan Kepala Daerah. Apalagi penelitian-penelitian di atas menunjukkan adanya keterputusan informasi keilmuan, karena tulisan-tulisan di atas cenderung berkuat pada Tarekat Cukir yang berkembang pada Orde

Baru. Padahal perubahan terus berlangsung dan berkelanjutan. Penelitian berupa disertasi ini bermaksud mengisi kekosongan itu.

Tarekat dan Pemilu/ Pemilukada. Muhammad Armin Arsyad dan M. Basyir Syam (2014) meneliti tentang pilihan politik pengikut sebuah tarekat dalam Pemilukada di Majene 2011. Artikel ini menemukan faktor penyebab dukungan kelompok Tarekat *Qadiriyyah* terhadap salah satu kandidat bupati; 1)) adanya hubungan kekerabatan antara mursyid dengan kandidat, 2) adanya perhatian kandidat terhadap keberlangsungan dakwah tarekat, 3) adanya kontribusi dari kandidat baik berupa moril maupun materiil. Artikel ini menunjukkan perbedaan dengan penelitian yang penulis kaji, baik secara empiris maupun teoritis. Secara empiris, unit penelitiannya pada Tarekat *Qadiriyyah*, di Kabupaten Majene, periodasi tahun 2011. Sementara disertasi ini unit penelitiannya kelompok Tarekat *Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah*, di Cukir Jombang, periodasi tahun 2018. Sedangkan secara teoritis, artikel tersebut belum mampu menjelaskan modal apa yang dimiliki masing-masing pihak dan bagaimana strategi menjalankannya. Tetapi temuan-temuannya bisa dijadikan pembandingan bagi temuan dalam penelitian ini.

Artikel Muhammad (2017) membahas tentang peran Tarekat *Qadiriyyah* dalam pemenangan kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur di Sulawesi Barat. Hal penting yang perlu dicatat dari penelitian kualitatif ini adalah ditemukannya dua strategi yang digunakan oleh Tarekat *Qadiriyyah* untuk memenangkan kandidat yang didukungnya. *Pertama*, perjuangan di internal komunitas Tarekat *Qadiriyyah* melalui komunikasi yang intens, termasuk menyampaikan rasionalisasi mengapa kandidat layak untuk dipilih. *Kedua*, perjuangan di eksternal komunitas tarekat, melalui 3 kelompok; yaitu imam desa, pejabat/ mantan pejabat birokrasi, politisi, dan pengusaha pengikut tarekat. Artikel tersebut juga menemukan 3 faktor yang menjadi alasan tarekat *Qadiriyyah* terlibat dalam politik mendukung calon gubernur Anwar Adnan Saleh – Amri Sanusi pada Pilkada di Sulawesi Barat. 1) faktor sejarah yaitu adanya pengalaman pimpinan tarekat *Qadiriyyah* pada masa lalu yaitu Syekh K. H. Muhammad Shaleh berpartisipasi sebagai juru kampanye partai Golkar, 2) faktor kedekatan antara mursyid tarekat dengan Anwar Adnan Saleh, 3) faktor nilai yang berlaku pada tarekat yang mewajibkan para pengikutnya untuk senantiasa patuh terhadap mursyidnya. Penelitian ini,

secara empiris memiliki perbedaan dengan disertasi ini, baik secara batasan lokasi, organisasi, maupun periodasi kasus, yaitu Pilgub 2006.

Artikel Sadri Chaniago, Bakaruddin Rosyidi Ahmad, dan Zulfadli (2015) membahas tentang dukungan Tarekat *Shathariyah* terhadap salah satu kandidat Gubernur Sumatera Barat 2010. Di internal tarekat tersebut terjadi fenomena dualisme dukungan kandidat. Zubir tuanku Kuniang mendukung kandidat pasangan Irwan Prayitno-Muslim Kasim dan bahkan mengkampanyekannya, sementara Ismet Ismael Mudo, dan Darwinis mendukung kandidat pasangan Endang Irzal-Asrul Syukur. Berbeda dengan disertasi ini yang berfokus pada fenomena dualisme pilihan politik Tarekat *Qadiriyah wa Naqsyabandiyah* Cukir; satu sisi tarekat ini mendukung PPP sebagai penyaluran suara, tetapi menolak mendukung kandidat bupati Jombang yang diusung partai tersebut. Di sisi lain, tarekat ini justru mendukung kandidat bupati yang diusung partai Golkar. Perbedaan kasus akan berimplikasi pada hasil temuan yang berbeda pula. Tetapi patut dicatat bahwa setidaknya ada lima faktor yang mempengaruhi dukungan tarekat terhadap calon dalam pilkada. *Pertama*, adanya hubungan emosional yang telah terjalin dengan kandidat karena kekerabatan. *Kedua*, adanya hubungan sesama satu daerah. *Ketiga*, pihak tarekat berharap nantinya kandidat akan memperhatikan kepentingan Tarekat *Syathariyah*; pembinaan dan perlindungan terhadap kaum Tarekat *Syathariyah*, pemberian bantuan untuk kebutuhan surau dan pesantren tradisional *Syathariyah*, serta hubungan silaturahmi yang berkelanjutan. *Keempat*, kualitas kandidat sudah teruji. *Kelima*, pertimbangan kepentingan pribadi berupa materi.

Artikel Elen Setyawati (2017) dalam penelitiannya tentang keterlibatan Tarekat *Naqsyabandiyah* dalam ranah politik lokal di Desa Sontang Rokan Hulu. Ia menemukan bahwa meskipun Tarekat *Naqsyabandiyah* secara formal belum menjadi organisasi yang diakui oleh pemerintah, namun tarekat di Desa Sontang ini memiliki pengaruh yang kuat yang digunakan sebagai alat politik oleh elit desa tersebut untuk meraih kekuasaan, baik di tingkat lokal maupun level yang lebih luas. Contohnya, adanya upaya pemenangan salah satu kandidat tertentu pada kasus Pilbup Rokan Hulu 2011, yang dilakukan dengan cara memanfaatkan adab tarekat jama'ah agar tunduk dan patuh dengan instruksi tuan guru. Pada kasus tersebut, Tarekat *Naqsyabandiyah* mendukung salah satu kandidat disertai dengan arahan dari si mursyid

terhadap jama'ahnya. Dukungan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor; 1) faktor kedekatan interpersonal antara guru tarekat dengan kandidat; 2) faktor performa kandidat yang dinilainya baik dalam mendukung keberlangsungan dakwah kaum Tarekat *Naqsyabandiyah*. Artikel Setyawati menunjukkan perbedaan dengan kajian penulis di lihat dari sisi batasan lokasi, organisasi, dan kasus. Artikel nya juga belum menjawab persoalan isu penting tentang modal yang digunakan dalam berelasi dengan pihak lain, posisi agen dan struktur, juga isu dominasi. Hanya saja, temuan-temuannya menjadi penting bagi peneliti sebagai bahan perbandingan.

Dari survei literatur di atas, penelitian yang fokus meneliti tentang kelompok tarekat yang dikaitkannya dengan teori praksis sosial, yaitu sebuah teori yang berkembang dalam ilmu-ilmu sosial politik. Dalam hal ini, teori praksis sosial yang dikembangkan oleh Pierre Buordieu.

Teori ini melihat manusia bukan sekedar obyek yang dipengaruhi struktur, namun ia juga memiliki kebebasan dan bahkan menentukan struktur. Karenanya dalam relasinya dengan pihak lain, manusia adalah “agen” aktif, kreatif, dan bahkan manipulatif yang berorientasi kepada kepentingan dirinya. Setiap orang sama-sama menjalankan praksisnya untuk mencapai keunggulan, meskipun dalam proses menjalankan praktik tersebut ada yang unggul dan “kalah” atau mengalah, namun sifatnya sementara, karena kuasa itu bersifat dinamis dan kuasa bukan milik elite tertentu, tetapi ia dijalankan oleh semua orang. Dalam kaitannya dengan relasi antar kelompok, setiap kelompok menjalankan praksisnya, termasuk kelompok tarekat, partai politik dan kepala daerah. Bahkan ketika salah satu tampak lebih unggul, bukan berarti yang tampak kalah itu tidak menjalankan praktisnya. Tetapi ia menjalankan kuasanya sesuai dengan kepentingannya. Proses memilih atau tidak memilih, menerima atau tidak menerima, mengadaptasi atau tidak mengadaptasi tentang suatu ide atau pengetahuan dan tindakan dari pihak lain merupakan indikator bahwa pihak tersebut juga menjalankan kuasa. Lebih dari itu, kemenangan suatu pihak justru karena adanya legitimasi dari yang “kalah” karena disesuaikan dengan kepentingan pihak yang “kalah” tersebut.